

**Notulensi**  
**Rapat Koordinasi Kolaborasi Multi Pihak Dalam Penanganan Respons Covid-19**  
**Tanggal: 4 Agustus 2020**

**PESERTA:**

**Kementerian dan Lembaga**

1. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana - Kemenko PMK
2. Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana – Kemenko PMK
3. Kantor Staf Presiden
4. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan – BNPB
5. Direktur Logistik - BNPB
6. Perwakilan Kepala Pusat Krisis Kesehatan - Kementerian Kesehatan
7. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Perwakilan Direktorat Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam- Kementerian Sosial
9. Direktorat MPBK
10. Kepala Bagian Data Perencanaan dan Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal – Kementerian Agama
11. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Adwil  
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Adwil
12. KPPPA
13. Pusdokkes POLRI
14. SOPS POLRI
15. RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sutanto
16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17. Direktorat Operasi - BASARNAS

**Non Pemerintah**

1. Mitra Klaster Nasional Penanggulangan Bencana (UNOCHA, WFP, IFRC, UNICEF, UNFPA, FAO, WHO dan UNDP)
2. HFI (Humanitarian Forum Indonesia)
3. Forum PRB Yogyakarta
4. Forum PRB NTT
5. Sejajar

**PEMBUKAAN**

**ASISTEN DEPUTI PENANGANAN PASCA BENCANA KEMENKO PMK**

Bapak Nelwan Harahap menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan update dari masing-masing klaster/sub-klaster/kelompok kerja, HFI serta jejaring Forum Pengurangan Risiko Bencana dan SEJAJAR. Rakor pertama diadakan pada tanggal 25 Juni 2020. Rapat koordinasi kolaborasi multi pihak kedua ini dilaksanakan dengan dihadiri berbagai kementerian/Lembaga terkait serta berbagai lembaga non pemerintah mewakili mitra Klaster Nasional termasuk lembaga internasional, HFI serta jejaring Forum Pengurangan Risiko Bencana dan SEJAJAR. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang cukup baik untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam rangka mendukung kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia.

#### **DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA KEMENKO PMK**

Bapak Dody Usodo HGS, membuka rapat koordinasi dengan memberikan arahan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 dan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah digantikan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang diketuai oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Ketiga Menteri Koordinator menjadi wakil selain Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Ketua Pelaksana Harian Komite tersebut adalah Menteri BUMN. Komite terdiri dari dua Satuan Tugas (Satgas) yaitu: Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 (yang merupakan sublimasi Gugus Tugas) di mana susunan satgas tidak berubah dari Gugus Tugas yang lalu. Satgas Percepatan Pemulihan Ekonomi diketuai Wakil Menteri I Kemen BUMN.
- Mengacu kepada Kepres 82/2020, tugas-tugas Kemenko PMK tidak berubah yaitu tetap melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kerawanan sosial dan dampak bencana.
- Bapak Dody meninjau kondisi Kabupaten Luwu Utara (Masamba) bersama Menteri Koordinator PMK serta kementerian/Lembaga lainnya. Menjadi keprihatinan kita bersama sementara kita tengah menghadapi COVID-19, bencana lain terjadi dimana 38 orang meninggal, 196 luka, dan 10 orang hilang. Kemenko PMK beserta kementerian/Lembaga dan penggiat kemanusiaan lainnya memberikan dukungan moril dan material. Rapat koordinasi dilakukan di kantor Bupati. Kemenko PMK bertemu dengan relawan multi pihak di Masamba termasuk PMI, MDMC dan lainnya.
- Bapak Dody akan menghadiri pertemuan bersama Setneg untuk membahas rancangan Perpres tentang PB. Sementara RUU PB belum disahkan telah ada draft Perpres yang telah dibahas sejak tahun 2018. Untuk itu Bapak Dody mengusulkan agar finalisasi draft Perpres tersebut ditunda untuk menunggu UU PB disahkan sehingga tidak perlu merubah di kemudian hari.

- Selaku perwakilan Kemenko PMK, Bapak Dody menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi dan kolaborasi multipihak yang sudah melakukan tugas-tugas kemanusiaan dengan sepenuh hati termasuk tenaga kesehatan, TNI dan POLRI baik untuk bencana alam maupun COVID-19. Pertemuan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku kolaborasi multi pihak dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan yang dijalankannya.

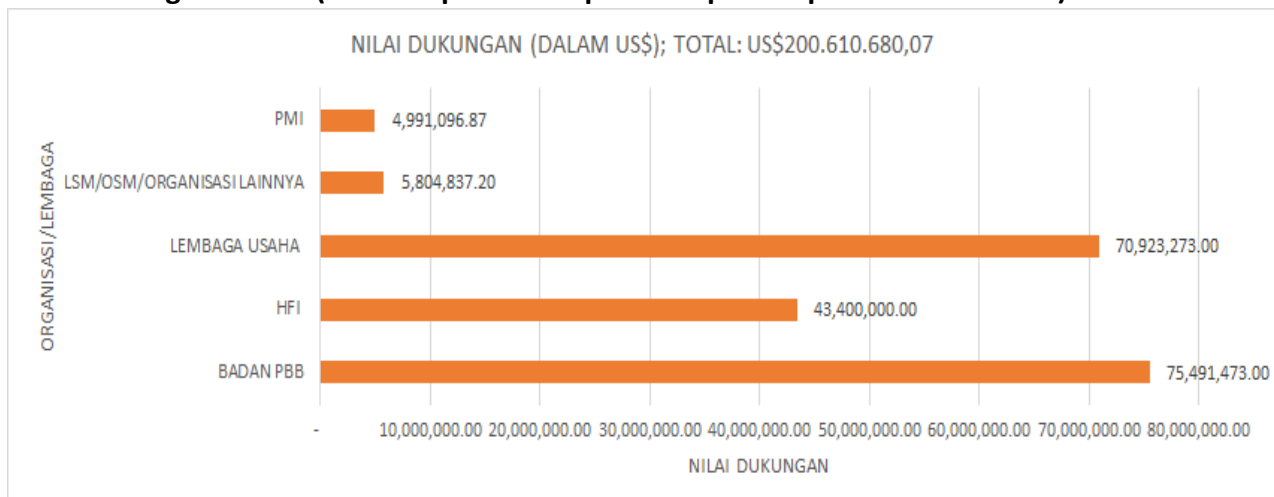
### PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

Dijelaskan oleh UN OCHA sebagai koordinator para *focal point* klaster/sub-klaster/kelompok kerja mitra Klaster Nasional mengenai berbagai upaya koordinasi yang dilakukan selain Klaster Nasional, juga HFI, Forum PRB dan SEJAJAR.

Update progres disampaikan (presentasi terlampir):

- Mitra Klaster Nasional Penanggulangan Bencana disampaikan oleh focal point dari setiap klaster/sub-klaster/kelompok kerja. Update disampaikan oleh WFP, IFRC, UNICEF, UNFPA, Kementerian Sosial, FAO, WHO, dan UNDP.
- Humanitarian Forum Indonesia (HFI)
- Forum Pengurangan Risiko Bencana Yogyakarta
- Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT
- SEJAJAR

**Nilai dukungan pendanaan melalui kolaborasi multi pihak non pemerintah per 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut (detail dapat dilihat pada lampiran laporan keseluruhan):**



**HAL-HAL KUNCI YANG DISAMPAIKAN FOCAL POINT DARI KLASTER/SUB-KLASTER/POKJA, HFI, FORUM PRB YOGYAKARTA, FORUM PRB NTT, DAN SEJAJAR:**

- Klaster Logistik

1. Memetakan kapasitas lembaga usaha di beberapa provinsi yang terdampak COVID-19 cukup tinggi mengingat potensi sumber daya yang cukup besar dari Lembaga usaha tersebut yang belum disinergikan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
2. Mendorong aktivasi Klaster Logistik tingkat provinsi di Sulawesi Tengah seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di sana. Rencana berikut adalah mendorong Klaster Logistik di provinsi lain seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan lainnya.
3. Mendorong sinergitas antara upaya Klaster Logistik dengan Kemenkes dalam hal logistic kesehatan; menyusun penyusunan strategi pengembangan kapasitas bersama Pusat Krisis Kemenkes dalam penggunaan alkes yang didistribusikan ke daerah; pemetaan kapasitas *cold storage* untuk mengantisipasi penyimpanan produk vaksin yang direncanakan siap didistribusikan dalam bulan Januari 2020.
4. Pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional:
  - Fasilitas *rush handling* dengan adanya Komite Nasional (inpress 82/2020): apakah ma ini fasilitasi fasilitas percepatan (satu hari selesai) dokumen lain menyusul. Apakah masih diberikan?
  - Pembebasan bea masuk: dengan adanya Komite tentunya adanya penyesuaian, bagaimana pelaksanaannya secara operasional.

- **Klaster Pengungsian dan Perlindungan**

- **Sub-Klaster Shelter:**

1. Sinergi antara beberapa kementerian (Kemendagri, Kemendikbud, Kemensos) untuk pelaksanaan panduan yang telah disusun oleh sub-klaster Shelter di dalam Klaster Pengungsian dan Perlindungan;
2. Peningkatan kapasitas relawan dan pekerjaan kemanusiaan dalam.
3. Rencana kontinjensi Shelter Kemanusiaan pada masa pandemic yang akan berbeda pada masa biasa (tidak ada pandemi).
4. Tim Pendukung Sub-Klaster Shelter akan berakhir pada bulan September 2020.

- **Sub-Klaster Air, Sanitasi dan Hygiene**

1. Survei 3M (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak) bersama KSP dengan mengajak responden melakukan pengamatan. Hasil survei diharapkan berguna untuk berbagai pihak.
2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM): Kemenkes telah mensosialisasikan Panduan STBM dalam Pandemi. Suatu pendekatan agar berubah perilaku melalui pemicuan dalam kondisi pandemi. Bisa diterapkan untuk berbagai setting (bencana alam yang terjadi). Harapannya panduan ini dapat disosialisasikan oleh Satgas.
3. Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah, relawan dan organisasi penggiat kemanusiaan lainnya (seperti kapasitas untuk mengkoordinasi) untuk mencegah penularan COVID-19

- **Sub-Klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Penampungan (KMTP)**
  1. Proses pendataan pengungsi internal hanya terfokus pada fase tanggap darurat bencana. Dinamisnya kondisi di pengungsian mengharuskan proses pendataan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar terus bisa di berikan oleh pemerintah dan actor kemanusiaan lain
  2. Masih sedikitnya Lembaga yang mendedikasikan diri untuk berperan dalam sektor KMTP.
  3. Belum jelasnya pembagian peran dan tugas yang harus diemban oleh masing-masing Lembaga seperti pemerintah, Lembaga kemanusiaan dan entitas lain untuk memegang tiga fungsi utama dalam KMTP yaitu Camp Administrator, Camp Coordinator dan Camp Manager. Pembagian peran yang jelas dapat mempermudah koordinasi dan manajemen di tempat pengungsian
  
- **Sub-Klaster Perlindungan Anak**
  1. Memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran diintegrasikan antara lain dalam pelaksanaan kembali ke belajar (baik belajar di rumah maupun di sekolah)
  2. Penyebarluasan dan pelaksanaan protocol-protokol lintas sektor untuk perlindungan anak terutama protocol terkait pengasuhan sementara bagi anak yang terdampak COVID-19. Protokol ini selain untuk KPPPA dan Kemensos, juga berfokus pada peran sektor kesehatan dan masyarakat (Kementerian Desa).
  3. Memastikan layanan terus berjalan untuk anak, termasuk di sektor kesehatan (layanan bagi anak yang menjadi korban), catatan sipil, peradilan.
  
- **Sub-Klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
  1. Memastikan keberlangsungan pelayanan pencegahan dan penanganan KBG. Berdasarkan hasil survey BPS 2016 dalam situasi normal 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan di dalam rumahnya, apalagi saat pandemi.
  2. Sulitnya akses penyintas dan korban kekuntuk rumah aman karena sulitnya akses bagi korban kekerasan berbasis gender karena diperlukan surat keterangan bebas COVID-19. Surat keterangan tersebut menjadi beban bagi korban yang mengalami ketakutan, trauma dan memastikan kerahasiaan di lokasi rumah aman.
  3. Penyadaran dan pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam masa adaptasi kebiasaan baru.
  
- **Sub-Klaster Dukungan Psikososial**
  1. Perlunya peningkatan kapasitas dukungan psikososial melalui pelatihan bagi penggiat kemanusiaan secara luas.

2. Pentingnya koordinasi antara penggiat dukungan psikososial dan kesehatan jiwa. Strategi layanan dukungan psikososial berbasis rumah sakit dimana layanan tidak berarti hanya diberikan klinis tetapi juga ada dimensi dukungan psikososial yang diberikan.
  3. Manajemen informasi yang lebih terstruktur untuk memahami secara strategis kelompok yang disasar, efektifitas layanan dan siapa saja yang sudah melakukan layanan dukungan psikososial.
- **Kelompok Kerja Bantuan Non Tunai**
    1. Mendorong kaitan antara bantuan non tunai bagi masyarakat terdampak bencana dan perlindungan sosial adaptif.
    2. Koordinasi antar kementerian/Lembaga serta anggota Pokja Bantuan Non Tunai akan sangat bermanfaat untuk menghindari lapis sanding bantuan, duplikasi, memastikan kelompok rentan mendapatkan bantuan sosial yang diperlukan mengingat Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga memberikan berbagai bantuan sosial
    3. Memastikan pelaku penanganan COVID-19 terutama Lembaga usaha mematuhi peraturan perundangan Pemerintah dalam memberikan bantuan non tunai untuk menjamin harkat martabat penerima bantuan, sesuai dengan besaran nilai bantuan yang layak, serta menghindari permasalahan sosial di masyarakat
  - **Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat**
    1. Memastikan adanya pusat (kios) informasi terpadu yang memberikan informasi tentang COVID-19, layanan-layanan dan rujukan yang tersedia untuk mereka yang terdampak COVID-19 termasuk dalam kasus kekerasan berbasis gender, dampak sosial ekonomi seperti bantuan non tunai.
    2. Perubahan perilaku Pemda memperkuat komunikasi risiko di masyarakat di tingkat sub-nasional.
    3. Pemda penegakan protocol dengan reaktivasi dengan cara-cara yang persuasive dan sanksional dan tidak menggunakan kekerasan.
  - **Klaster Pendidikan**
    1. Akses listrik dan internet di wilayah 3T (6.377 satuan Pendidikan tidak memiliki akses tersebut = 509.597 peserta didik).
    2. Penerapan SKB4 Menteri: perlu dorongan Pemerintah Pusat untuk mendorong dan memastikan daerah membuka sekolah dengan kesiapan fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan penunjang.
    3. Beban kuota internet bagi orang tua dan sarana pendukungnya (gawai atau laptop).
    4. Belum teraktivasinya Pos Pendidikan: penyebaran informasi regulasi tidak tersampaikan ke tingkat sekolah.

- **Klaster Ekonomi:**
  - **Sub-Klaster Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
    1. Distribusi produk pangan serta sarana dan prasarannya yang dikoordinasi Badan Ketahanan Pangan.
    2. Pengkajian dampak COVID-19 pada harga komoditas pertanian dan perikanan (beberapa sedang dijalankan).
  
- **Klaster Kesehatan**
  1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi di sektor kesehatan karena dampak COVID-19 tidak hanya pada isu kesehatan, dengan melibatkan berbagai kementerian/Lembaga lain (tidak hanya Kementerian Kesehatan). Diperlukan kolaborasi multipihak untuk memberikan keseimbangan antara penanganan COVID-19 dan layanan esensial kesehatan lainnya.
  2. Akses informasi mengenai kesehatan seperti kapasitas sistem kesehatan dan laboratorium sehingga bisa dilakukan monitoring bersama untuk memahami gap/kesenjangan yang ada yang bisa didukung melalui kolaborasi multipihak.
  3. Diperlukan mekanisme penyaluran yang lebih baik untuk dukungan dari mitra melalui koordinasi yang baik.
  - **Sub-Klaster Gizi:**
    1. Banyaknya donasi susu formula dan produk-produk pengganti ASI yang tidak terkontrol (tidak melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat) sehingga dikhawatirkan dapat menurunkan angka ibu menyusui.
  - **Sub-Klaster Kesehatan Reproduksi:**
    1. Perlindungan pada tenaga kesehatan (seperti bidan) yang memberikan layanan esensial kesehatan reproduksi. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan layanan tersebut seperti layanan ibu hamil dan melahirkan serta layanan keluarga berencana untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.
    2. Perlu penguatan pendataan yang berjenjang dan terpilah termasuk dengan data disabilitas, ibu hamil dan suspek COVID-19 untuk memastikan pendataan terpilah khususnya data ibu hamil.
    3. Perlu upaya lebih kuat dari Pemerintah untuk memastikan stok kecukupan ARV di daerah untuk penderita HIV/AIDS.
  
- **Klaster Pemulihan Dini**
  1. Diperlukan kerangka kebijakan operasional Pemerintah dalam proses identifikasi dan perencanaan kegiatan pemulihan terutama terkait dengan peraturan/kebijakan yang ada

dan peran Pemerintah Daerah khususnya mengacu pada kondisi dan dampak yang berbeda.

2. Perlunya dukungan kerangka kebijakan untuk keterlibatan aktor-aktor non pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan sosial dari aspek dukungan pendanaan (misalnya mekanisme kontribusi pendanaan pihak swasta ke program perlindungan sosial yang ada), koordinasi program-program perlindungan sosial yang dijalankan oleh lembaga non pemerintah atau swasta jika dimungkinkan.
3. Tata kelola data penerima manfaat (eligible beneficiary) antara Lembaga-lembaga dan kementerian pelaksana program perlindungan sosial (misalnya BLT Kemensos dan BLT Kemendes). Diperlukan mekanisme tatakelola yang meminimalisir duplikasi distribusi bantuan.

- **HUMANITARIAN FORUM INDONESIA (HFI)**

1. Perlunya peningkatan kapasitas bagi pekerja kemanusiaan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai standar, protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 dan tetap dapat memberikan layanan kemanusiaan.
2. Memastikan perlindungan relawan kemanusiaan dari kekerasan dalam menjalankan tugasnya.

- **FORUM PRB DI YOGYAKARTA**

1. Kesiapsiagaan menghadapi erupsi Gunung Merapi: review rencana kontinjensi Merapi (bersama BNPB, Pusat Studi Bencana UPN). Table-top exercise akan dilakukan bulan Agustus untuk melihat kesiapan pemda kabupaten/kota terutama Sleman (sumber daya dan kesiapsiagaan) dan penyesuaian yang harus dilakukan.
2. Peningkatan kapasitas untuk memperkuat ketangguhan masyarakat di dalam response COVID-19. Melalui jaringan 75 desa dari 5 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan penularan covid-19. Salah satu temuan adalah Dari hasil identifikasi ditemukan bahwa perilaku masyarakat new normal diartikan sebagai kondisi normal.
3. Menyusun dan menerbitkan panduan kedua bagi masyarakat untuk adaptasi kebiasaan baru bersama BPBD DIY dengan memasukkan isu marginal seperti lansia dan disabilitas. Panduan pertama sudah diterbitkan untuk masyarakat dalam kondisi tanggap darurat COVID-19.

- **FORUM PRB NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Perubahan pejabat OPD diharapkan tidak mempengaruhi koordinasi klaster dan sub-klaster telah mulai berjalan di tingkat provinsi (Pendidikan, Air-Sanitasi-Hygiene, Perlindungan Anak, Perlindungan dan Penanganan terhadap Kekerasan Berbasis Gender).



2. Pengembangan piranti "PANTASCEGAH" untuk memantau perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan protocol kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Diharapkan hasil pemantauan dapat digunakan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain yang memerlukan.
3. Mendorong koordinasi multi pihak di tingkat kabupaten bersama BPBD dan Forum PRB di kabupaten/kota (yang telah ada).

- **SEJAJAR**

1. Perlindungan tenaga kesehatan
  - Keselamatan tenakes harus lebih dicari solusinya benar-benar lebih serius karena angka kematian Indonesia termasuk tertinggi di dunia, mungkin ada sistem yang perlu disupport;
  - Ketersediaan masker N95 saat ini masih mahal, maka pemerintah harus berperan mengatasi soal harga ini agar masker N95 lebih murah karena yang digarda depan sangat membutuhkan;
  - Perlindungan dari isu-isu negatif nakes: perlindungan mental dari isu negatif, stigma, tekanan pemda, tekanan keluarga, tekanan masyarakat
  - Perlindungan hukum saat bekerja sesuai prosedur.
  - Forum ilmiah utk membahas modalitas terapeutik yg optimal-affordable bagi semua lini faskes.
2. *Tracing dan tracking*
  - Pasien positif beberapa Rumah Sakit (RS) dihalang-halangi krn khawatir "citra" kasus banyak dan menakut-nakuti.
  - Informasi tracking, tracing dan testing harus lebih jelas
  - Apakah Rapid Test masih akan dilanjutkan krn tdk bisa menjangkau org yg terinfeksi
  - Kemudahan dan percepatan proses diagnostic
3. Hubungan Pusat-Provinsi-Daerah dan peran pemerintah dalam edukasi publik
  - Proses move linier tidaknya kebijakan daerah dgn provinsi dan pusat agar tidak ada lagi RS yang dibenturkan dengan masyarakat
  - Edukasi masif terkait covid karena pola kesakitan yg terus berubah
  - Negara harus tegas menindak publik figur seperti anji dan nara sumbernya
  - Mereview kapasitas RS termasuk kemampuan pendanaannya.

## **TANGGAPAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA**

- **ASISTEN DEPUTI PENANGANAN PASCA BENCANA, KEMENKO PMK**
  - Dari awal penanganan COVID-19 yang kita lakukan adalah upaya simultan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, dan pemulihan karena dampak COVID-19 tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

adalah upaya serius Pemerintah untuk memulihkan kembali aktivitas perekonomian secara nasional. Oleh sebab itu, di akhir penanganan kita perlu membentuk tim kecil untuk menyusun policy brief yang memberikan saran atas permasalahan yang di tiap bidang kerja masing-masing focal point untuk diserahkan kepada Komite Nasional untuk ditindaklanjuti secara terarah oleh kementerian/Lembaga terkait.

- **DIREKTUR PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN, BNPB**

- **Laboratorium:** saat ini sudah ada 270 laboratorium untuk menguji langsung di daerah serta mobile laboratorium yang disebar ke kabupaten/kota. Target 30.000 test dilakukan per hari tetapi sumber daya manusia yang kita miliki masih terbatas kemampuannya dan belum optimal menjalankan kegiatannya.
- **Sarana dan prasarana (sarpras) termasuk PCR:** 34 provinsi sudah memiliki sarpras pendukung, tetapi belum menyeluruh di 514 kabupaten/kota. Kepala daerah saat ini berpacu untuk menyiapkan sarpras pendukung melalui permintaan PCR kepada Satgas. Persyaratan Satgas atas permintaan tsb. adalah penyiapan SDM, sarana Gedung yang memenuhi standar, anggaran yang cukup untuk pembelian bahan habis pakainya.
- **Perencanaan penyiapan APD (seperti hazmat) dan alat pendukungnya:** dengan kecepatan dan percepatan yang dilakukan Gugus Tugas saat ini sudah banyak pabrik garmen yang menjadi pabrik hazmat dengan izin edar. Kemen Ristek dan berbagai pihak juga melakukan inovasi untuk produksi di dalam negeri. Bantuan juga diterima dari negara sahabat, masyarakat, dan pengusaha yang peduli. Stok secara nasional masih mencukupi.
- **Pengadaan:** re-focussing anggaran kementerian/Lembaga dan pemda. Secara nasional kita bisa memenuhi standar minimal kebutuhan kabupaten/kota.
- **Penyimpanan:** PCR membutuhkan penyimpanan yang khusus (suhu  $-20^{\circ}$  C) sehingga perlu *cold chain dan cold storage*. Sudah banyak pengusaha yang menyiapkan cold chain dan cold storage yang diperlukan.
- **Pendistribusian:** semua kegiatan pengelolaan logistik dan peralatan dilaksanakan sesuai standar. Untuk mengantisipasi produksi vaksin, Perpress No. 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan ada satu bidang khusus yang dibentuk untuk pelayanan kesehatan untuk mengintegrasikan upaya kesehatan termasuk obat dan laboratorium dan PCR serta perangkatnya.

- **DIREKTUR LOGISTIK, BNPB**

- **Klaster Nasional:** pengembangan jejaring multi pihak dan koordinasinya untuk menghindari tumpang tindih dan sinergi multi pihak.

- **Bantuan logistik multi pihak:** telah banyak diterima oleh Gugus Tugas termasuk bantuan dari 178 perusahaan dan telah didistribusikan.

**Catatan penjelasan mengenai Klaster Nasional Penanggulangan Bencana:**

Pada tahun 2014, BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga pemerintah sepakat untuk mengadopsi pendekatan klaster sebagai mekanisme koordinasi multipemangku kepentingan dalam isu-isu kemanusiaan di Indonesia; kesepakatan tersebut diformalkan melalui Surat Keputusan Nomor 173 Tahun 2014 dari Kepala BNPB. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial memberlakukan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 26, Tahun 2015, tentang Klaster Nasional untuk Pengungsian dan Pedoman Perlindungan. Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kesehatan.

Karena dampak COVID-19 melampaui masalah kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai Ketua Dewan Pengarah pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, telah mengambil tanggung jawab untuk mengoordinasikan sistem klaster nasional. Dengan posisi itu, Kementerian Koordinator menghubungkan kegiatan klaster nasional dengan Gugus Tugas Nasional Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19.

No.	Klaster Nasional	Koordinator	Wakil Koordinator
1	<p><u>Kesehatan</u>, dengan enam sub-klaster dan tiga tim pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan kesehatan</li> <li>• Pengendalian penyakit, sanitasi lingkungan dan pasokan air bersih</li> <li>• Kesehatan reproduksi</li> <li>• Kesehatan mental</li> <li>• Identifikasi korban bencana (DVI)</li> <li>• Nutrisi</li> </ul> <p>Tiga tim pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Logistik Kesehatan</li> <li>• Tim Data dan Informasi</li> <li>• Tim Promosi Kesehatan</li> </ul>	Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Pusdokkes POLRI
2	<u>Search and Rescue (SAR)</u>	BASARNAS	TNI
3	<u>Logistik</u>	BNPB	Kementerian Sosial
4	<p><u>Pengungsian dan Perlindungan</u> dengan delapan sub-klaster dan dua kelompok kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penampungan</li> <li>• Air, Sanitasi dan Hygiene</li> <li>• Manajemen Pengungsian</li> <li>• Perlindungan Anak</li> <li>• Perlindungan Kelompok Rentan</li> <li>• Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis</li> </ul>	Kementerian Sosial	POLRI

	<p>Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Psikososial</li> <li>• Keamanan</li> </ul> <p>Dua kelompok kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Non Tunai, dan</li> <li>• Pelibatan Masyarakatnity Engagement</li> </ul>		
5	<u>Pendidikan</u>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Agama
6	<u>Sarana dan Prasarana</u>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
7	<u>Ekonomi</u> , dengan satu sub-klaster: Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian	Kementerian UKM dan Koperasi
8	<u>Pemulihan Dini</u>	Kementerian Dalam Negeri	BNPB

- Dijelaskan oleh Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana Kemenko PMK bahwa laporan rutin Kolaborasi Multi Pihak yang dikompilasi UN OCHA diserahkan setiap minggu kepada Kemenko PMK. Kemenko PMK mendiseminasikan laporan tersebut kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui PUSDALOPS PB sebagai bagian dari Gugus Tugas. Selanjutnya Kemenko PMK akan membagi laporan tersebut secara umum kepada BNPB.

- **KEMENTERIAN SOSIAL**

- Harapan agar Kemenko PMK dapat mendorong sinergi lintas kementerian/Lembaga untuk mendiskusikan strategi bersama dan memastikan isu dalam Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan (yang membawahi 8 sub-klaster) dapat disinergikan dengan klaster lain/kementerian/lembaga/penggiat kemanusiaan lain.
- Menghargai sekali peran Kemenko PMK sebagai koordinator antar klaster dalam penanganan COVID-19 serta menyampaikan laporan rutin klaster serta jejaring penggiat kemanusiaan lainnya.
- Umpan balik dari laporan tersebut dari Gugus Tugas/Satgas sangat diharapkan untuk bersinergi secara teknis dalam isu pengungsian dan perlindungan.

- **KEMENTERIAN KESEHATAN**

- Mendorong peran penggiat kemanusiaan non pemerintah dalam program pencegahan penularan COVID-19 dengan pelibatan masyarakat secara luas mengingat kebutuhan pencegahan penularan COVID-19 sangat besar. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif seperti menjaga kesehatan tubuh yang menjadi upaya dasar sangat penting dalam pencegahan penularan.

- Perlu diskusi secara lebih dalam untuk mendiskusikan upaya pencegahan dengan pelibatan masyarakat sesuai konteks kebutuhan di daerah.
- **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
  - Ada tiga panduan yang diterbitkan oleh Kemendagri yaitu:
    - Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19
    - Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya
    - Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosa dan Manajemen
  - Kemendagri telah dan terus mensosialisasikan ketiga panduan tersebut ke daerah. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh Kemendagri termasuk memberi masukan kepada daerah dalam penerapan protocol kesehatan yang harus dilakukan.
  - Kemendagri akan bergerak melalui relawan untuk membantu sosialisasi panduan penanganan COVID-19 dan penerapannya.
  - Kemendagri juga akan memonitor penerapan tiga panduan tersebut.
- **SOPS POLRI**
  - Dalam penanganan COVID-19 POLRI berfungsi untuk isu kesehatan yang diemban oleh Pusdokkes dan Rumkit (fisik dan non fisik).
  - Untuk kegiatan pendukung lainnya maka dilakukan melalui SOPS. Di beberapa tempat POLRI sudah melakukan kegiatan bakti sosial dan kegiatan medis lainnya. SOPS menyusun pelaporan termasuk mengumpulkan data kegiatan kemanusiaan yang harus dilakukan untuk diteruskan kepada bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan tersebut.
  - Kegiatan POLRI harus dibantu oleh kementerian/Lembaga terutama kegiatan di lapangan yang membutuhkan dukungan misalnya di daerah konflik, daerah rawan bencana, atau terpencil/tidak terjangkau. Apalagi dengan pelaksanaan PILKADA yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali Aceh. Diperlukan strategi khusus untuk penanganan pengamanan PILKADA.
  - Kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas POLRI adalah jumlah peralatan yang tidak mencukupi di daerah.
- **KEMENTERIAN AGAMA**
  - Melakukan koordinasi/program secara virtual untuk kegiatan pendidikan yang diampu oleh Kementerian Agama.
  - Kementerian Agama juga memiliki Gugus Tugas yang bekerja secara internal dan eksternal.

- Untuk akses listrik dan internet, Kementerian Agama berharap agar Kemenko PMK dapat mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kementerian/Lembaga lain untuk mendukung penyediaan listrik dan internet bagi sekolah di daerah 3T.

Seluruh paparan dapat diakses pada tautan berikut:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Bey35nWBuoyfxmvpa98VrijH\\_pNQPDpF?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Bey35nWBuoyfxmvpa98VrijH_pNQPDpF?usp=sharing)

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

- Diskusi lebih lanjut tentang Logistik akan dilakukan melalui FGD oleh Kemenko PMK hari Rabu, 5 Agustus 2020.
- Kemenko PMK akan mendorong sinergi kementerian/Lembaga untuk tindak lanjut usulan yang disampaikan mitra klaster/sub-klaster/pokja, HFI, Forum PRB DI Yogyakarta dan NTT, SEJAJAR.
- Kemenko PMK akan mendiseminasikan laporan mingguan kolaborasi multi pihak kepada kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator/wakil koordinator klaster nasional penanggulangan bencana untuk menjadi pertimbangan kebijakan/tindakan yang diperlukan.
- Kemenko PMK akan mendorong pertemuan koordinasi Klaster Kesehatan untuk membangun sinergi mengadakan rapat koordinasi berikutnya dengan mengundang seluruh Kementerian/Lembaga terkait dalam kolaborasi multi pihak dalam bidang kesehatan.
- Kemenko PMK akan mendorong diskusi kementerian/Lembaga bersama SOPS POLRI untuk menyusun strategi pengamanan PILKADA.
- Kemenko PMK akan mendorong pembentukan satu tim kecil untuk menyusun policy brief yang menjadi masukan bagi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

**Tim Notulensi**

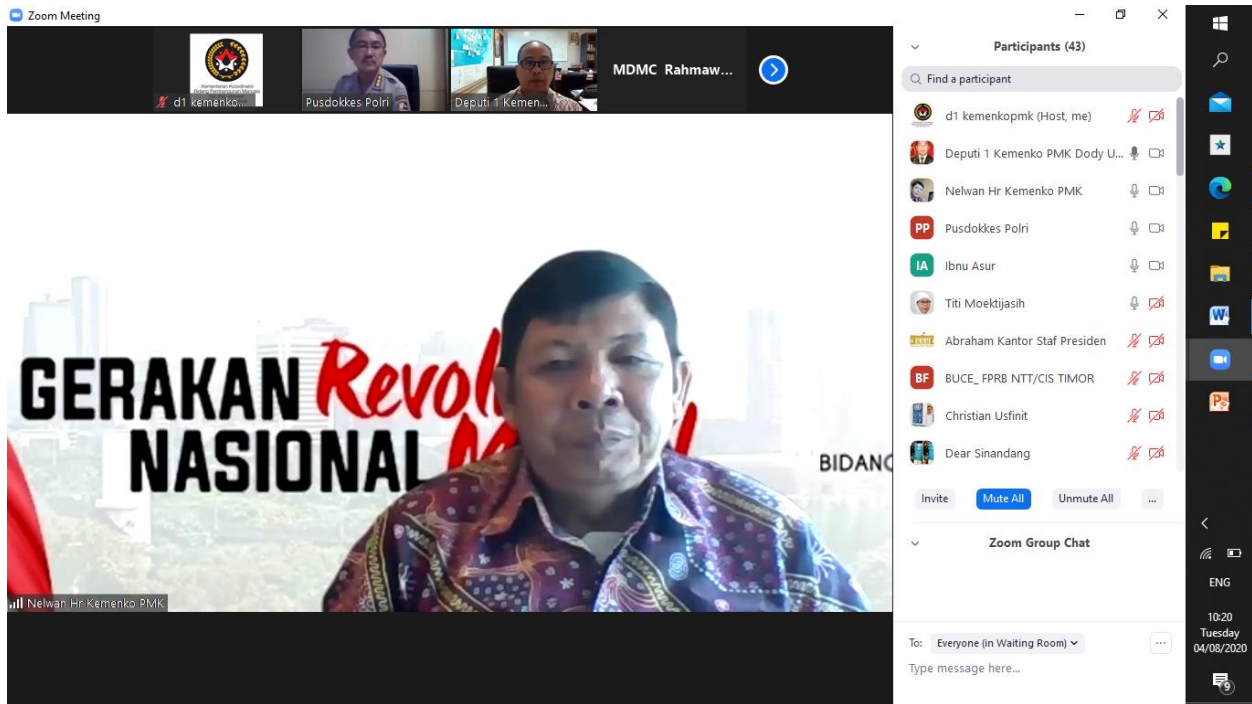
**DAFTAR HADIR****Rapat Koordinasi Kolaborasi Multi Pihak Dalam Penanganan Respons Covid-19****Tanggal, 4 Agustus 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>	<b>Jabatan</b>
1	Dody Usodo HGS	Kemenko PMK	Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan sosial dan Dampak Bencana
2	Nelwan Harahap	Kemenko PMK	Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana
3	Abraham	Kantor Staf Presiden	
4	Ahmi	Kantor Staf Presiden	
5	Rustian	BNPB	Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan
6	Ibnu Asur	BNPB	Direktur Logistik
7	Idha Kurniasih	Kementerian Sosial	Dukungan Psikososial
8	Oppie	Kemdikbud	
9	Rita djupuri	Kemenkes	Kabid FPKK
10	Deny	Kemen PU PR	
11	Fivi Diavanti	Kemen PPA	
12		SEJAJAR	Senior Advisor
13	Titi Moektijasih	UN OCHA	Humanitarian Affairs Analyst
14	Elizabeth Sidabutar	UNFPA	
15	Christian Usfinit	UNDP	Team Leader
16	Surya Rahman Muhammad	Humanitarian Forum Indonesia	Direktur Eksekutif
17	Dear NB Sinandang	Humanitarian Forum Indonesia & UNOCHA	Communication & Partnership Manager / Humanitarian Affairs Officer
18	Ranie Ayu Hapsari	FPRB DIY	Anggota Bidang KM
19	Dewi Fatmaningrum	FAO Indonesia	Food Security and Nutrition Officer
20	Wahyu Kuncoro	Unicef Indonesia	
21	Ikhsanuddin	UN WFP	Vulnerability Analyst and Mapping Officer
22	Wahyu Widayanto	IFRC	Tim Pendukung Sub Kluster Shelter
23	Ancilla Bere	UN WFP	Emergency Response and Preparedness ( EPR) Manager
24	Nadya S.Pryana	UN WFP	
25	Maria Dominika Albina Meo	WHO	Health Emergency Preparedness Strengthening - IMT WHO utk Covid-19
26	Setiawan Djati Laksono	WHO	
27	Enrico R. Djonoputro	UNICEF	WASH in Emergency Focal Point
28	Nugroho Indera Warman	UNICEF	Education Specialist
29	Widya	UNICEF	Konsultan
30	Khotimun Sutanti	MDMC-SEJAJAR	

31	Kristanto Sinandang	MPBI/RedR	
32	Ahmad Fikri	BAZNAS RI	
33	Buce Ga	Forum PRB Prov.NTT	Ketua
34	Nasfirman		
35	Hery Wijayanto	Kemenko PMK	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
36	Hotman Sihite	Kemenko PMK	Kabid Pemulihan
37	Suryanuddin	Kemenko PMK	Kasubbid Pemberdayaan Ekonomi
38	Kusuma Pata Mangiri	Kemenko PMK	Kasubbid Rehabilitasi
39	Yisnia Sopiani K	Kemenko PMK	Staf Pelaksana



# DOKUMENTASI RAPAT VIDEO CONFERENCE “RAPAT KOORDINASI KOLABORASI MULTI PIHAH DALAM PENANGANAN RESPONS COVID-19” TANGGAL, 4 AGUSTUS 2020



Zoom Meeting

Recording...

d1 kemenko... Pusdokkes Polri Deputi 1 Kemen... Nelwan Hr Kem...

Surya Rahman (HF)

Unmute Start Video Security Participants 50 Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions End

Participants (50)

Find a participant

- d1 kemenkopmk (Host, me)
- Deputi 1 Kemenko PMK Dody U...
- MDMC Rahmawati (Ama) Husein
- Pusdokkes Polri
- Ibnu Asur
- Nelwan Hr Kemenko PMK
- Titi Moektjasih
- Abraham Kantor Staf Presiden
- Ahmad Fikri - BAZNAS RI
- Ali Aulia Ramly - UNICEF

Zoom Group Chat

To: Everyone (in Waiting Room)

Type message here...

ENG  
10:28  
Tuesday  
04/08/2020

Zoom Meeting

Recording...

d1 kemenko... Pusdokkes Polri Titi Moektjasih Nelwan Hr Kem...

Ikhsan/WFP

Unmute Start Video Security Participants 50 Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions End

Participants (48)

Find a participant

- d1 kemenkopmk (Host, me)
- Ikhsan/WFP
- Nelwan Hr Kemenko PMK
- Pusdokkes Polri
- Titi Moektjasih
- Abraham Kantor Staf Presiden
- Ahmad Fikri - BAZNAS RI
- Ali Aulia Ramly - UNICEF
- BUCE\_FPRB NTT/CIS TIMOR
- Christian Usfinit

Zoom Group Chat

From Nelwan Hr Kemenko PMK to Everyone:  
Selamat Bergabung Pak Raja Kemendagri

To: Everyone

Type message here...

ENG  
10:40  
Tuesday  
04/08/2020

Zoom Meeting

Recording...

Participants: d1 kemenko..., GERAKAN Revolusi NASIONAL Nelwan Hr Kem..., Titi Moektjas..., Khotimun Sut...

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions End

Participants (38)

Find a participant

- d1 kemenkopmk (Host, me)
- Direktur Pengelolaan Logpal BN...
- Nelwan Hr Kemenko PMK
- ibnu Asur
- SALJIYANA, DFM
- Abraham Kantor Staf Presiden
- Ahmad Fikri - BAZNAS RI
- BUCE\_FPRB NTT/CIS TIMOR
- Dear Sinandang
- Deny
- Dewi Fatmaningrum
- Ditops BASARNAS
- Enrico-UNICEF
- Fivi Diawati
- hari

11:59 Tuesday 04/08/2020

Zoom Meeting

Recording... Speaker View

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions End

Participants (22)

Find a participant

- d1 kemenkopmk (Host, me)
- ibnu Asur
- Nelwan Hr Kemenko PMK
- Surya Rahman (HFJ)
- Titi Moektjasih
- ibeth UNFPA
- Ida Noor Qosim
- Raja Philip Sebayang Kemenda...
- SOPS POLRI - KOMBES POL RIN...
- Ahmad Fikri - BAZNAS RI
- BUCE\_FPRB NTT/CIS TIMOR
- Dear Sinandang
- Ditops BASARNAS
- hari
- Idha Kurniasih

13:01 Tuesday 04/08/2020



Zoom Meeting

Recording... Speaker View

The main window shows a 4x4 grid of 16 video thumbnails. The thumbnails contain the following names and logos from top-left to bottom-right:

- Rita Djupuri Pusat ...
- d1 kemenkopmk
- Raja Philip Sebaya...
- Pusdokes Polri
- Nelwan Hr Kemenko ...
- Titi Moektjasih
- OPIE-ROFIUDIN...
- Ditops BASARNAS
- hari
- Tenaga Ahli Mady...
- Idha Kurniasih
- Dear Sinandang
- Taufik Hendarto...
- Wahyu Widayanto
- Surya Rahman (HFI)
- YW

BUCE\_FPRB NT...

Unmute Start Video Security Participants 17 Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions End

Participants (17)

Find a participant

- d1 kemenkopmk (Host, me)
- IBeth UNFPA
- Nelwan Hr Kemenko PMK
- Titi Moektjasih
- BUCE\_FPRB NTT/CIS TIMOR
- Dear Sinandang
- Ditops BASARNAS
- hari
- Idha Kurniasih
- OPIE-ROFIUDIN-DitL PMPK
- Pusdokes Polri
- Raja Philip Sebayang Kemenda...
- Rita Djupuri Pusat Krisis Keseha...
- Surya Rahman (HFI)
- Taufik Hendarto/CBi

ENG  
13:02  
Tuesday  
04/08/2020